

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis alasan bergabungnya Indonesia ke dalam BRICS di tengah konstelasi geopolitik global yang ditandai oleh persaingan antara Amerika Serikat dan negara-negara Barat dengan kekuatan-kekuatan baru yang tergabung dalam BRICS. Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa keputusan Indonesia untuk bergabung dengan BRICS tidak dapat dipahami semata-mata sebagai langkah ekonomi pragmatis, melainkan sebagai strategi kebijakan luar negeri yang berakar pada persepsi ancaman terhadap struktur sistem internasional yang ada.

Menggunakan kerangka Threat Perception dalam konsep Balance of Threat Stephen M. Walt, penelitian ini menemukan bahwa Indonesia memersepsikan dominasi negara-negara Barat khususnya Amerika Serikat dalam sistem ekonomi, keuangan, dan tata kelola global sebagai bentuk ancaman struktural terhadap kedaulatan ekonomi dan ruang kebijakan nasional. Ancaman tersebut tidak bersifat militer, tetapi terwujud melalui ketergantungan pada dolar Amerika Serikat, ketimpangan representasi dalam lembaga-lembaga internasional seperti IMF dan Bank Dunia, serta praktik conditionality yang berpotensi membatasi otonomi negara berkembang dalam menentukan arah pembangunan nasionalnya. Dengan demikian, persepsi ancaman Indonesia bersifat sistemik dan jangka panjang, sejalan dengan perluasan makna ancaman dalam konteks politik ekonomi internasional kontemporer.

Dalam konteks ini, BRICS dipandang oleh Indonesia sebagai instrumen strategis untuk melakukan soft balancing terhadap dominasi Barat. Keanggotaan Indonesia dalam BRICS membuka peluang untuk memperluas diversifikasi mitra ekonomi dan politik, mengakses sumber pembiayaan alternatif melalui New Development Bank, serta memperkuat posisi tawar Indonesia dalam mendorong reformasi tata kelola global yang lebih inklusif dan multipolar. BRICS tidak dipersepsikan sebagai ancaman karena rendahnya niat ofensif, tidak adanya tekanan politik domestik, serta prinsip non-interference yang sejalan dengan kepentingan nasional Indonesia dan prinsip politik luar negeri bebas aktif.

Namun demikian, dalam penerapan Balance of Threat. Menurut Walt, negara cenderung melakukan balancing terhadap aktor yang paling mengancam secara langsung. Dalam kasus Indonesia, tidak terdapat ancaman militer maupun agresi langsung dari negara-negara Barat yang memaksa Indonesia untuk membentuk aliansi tandingan secara konfrontatif. Oleh karena itu, bergabungnya Indonesia ke BRICS tidak sepenuhnya dapat dijelaskan sebagai respons terhadap ancaman aktor tertentu, melainkan sebagai respons terhadap ancaman abstrak dan struktural yang melekat pada sistem internasional itu sendiri. Lebih lanjut, keputusan Indonesia untuk bergabung dengan BRICS tidak dapat dikategorikan sebagai bandwagoning terhadap kekuatan besar seperti Tiongkok atau Rusia. Indonesia tidak menunjukkan ketergantungan ideologis maupun keamanan terhadap salah satu anggota BRICS, serta tetap menjaga hubungan strategis dengan negara-negara Barat melalui forum seperti G20, OECD, dan kemitraan bilateral. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia menerapkan strategi hedging dan diplomasi multi-vektor, yakni memperluas opsi strategisnya tanpa terikat pada satu kutub kekuatan global

tertentu. Strategi ini mencerminkan adaptasi prinsip politik luar negeri bebas aktif dalam menghadapi realitas geopolitik multipolar. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa bergabungnya Indonesia ke BRICS merupakan manifestasi dari kebijakan luar negeri yang rasional dan adaptif dalam menghadapi perubahan struktur kekuatan global. Keputusan ini mencerminkan upaya Indonesia sebagai middle power untuk mengurangi risiko ketergantungan struktural, memperkuat kedaulatan ekonomi, serta meningkatkan peran dan pengaruhnya dalam sistem internasional yang semakin multipolar. Pada saat yang sama, kasus Indonesia memperkaya kajian hubungan internasional dengan menunjukkan bahwa persepsi ancaman dalam era globalisasi tidak lagi terbatas pada dimensi militer, melainkan juga mencakup dimensi ekonomi, institusional, dan struktural, yang menuntut pengembangan lebih lanjut terhadap teori-teori aliansi klasik. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa teori Balance of Threat tetap relevan dalam menjelaskan keputusan Indonesia bergabung dengan BRICS, meskipun dengan penyesuaian terhadap konteks kontemporer. Ancaman yang dihadapi Indonesia tidak lagi bersifat militer, melainkan struktural dan ekonomi, yang muncul dari ketidakseimbangan dalam sistem global. Indonesia merespons ancaman tersebut melalui strategi soft balancing dengan memanfaatkan BRICS sebagai instrumen untuk meningkatkan posisi tawar dan mengurangi ketergantungan terhadap dominasi Barat. Dengan demikian, keanggotaan Indonesia dalam BRICS tidak hanya merupakan kebijakan ekonomi, tetapi juga strategi geopolitik-ekonomi yang rasional dalam menghadapi perubahan struktur sistem internasional.

5.2 Saran

Keanggotaan Indonesia dalam BRICS perlu diposisikan secara strategis sebagai instrumen pelengkap dalam pelaksanaan politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif. Partisipasi Indonesia di BRICS sebaiknya dimanfaatkan secara selektif dan pragmatis untuk memperkuat posisi tawar Indonesia dalam tatanan global yang semakin multipolar. Untuk memastikan manfaat keanggotaan Indonesia di BRICS dapat dioptimalkan, diperlukan langkah-langkah kebijakan yang terkoordinasi, terutama melalui penyusunan peta jalan diplomasi Indonesia di BRICS yang jelas dan terukur. Dengan demikian keanggotaan Indonesia di BRICS tidak hanya simbolik tetapi mampu memberikan kontribusi nyata bagi pencapaian kepentingan nasional dan pembangunan jangka panjang.

Penelitian ini memiliki sejumlah keterbatasan yang sekaligus membuka ruang bagi pengembangan studi lanjutan yang lebih komprehensif. Secara akademis, penggunaan teori Balance of Threat dari Stephen M. Walt dalam penelitian ini terbukti relevan untuk menjelaskan perilaku Indonesia dalam merespons dinamika sistem internasional, khususnya melalui konsep threat perception dan strategi balancing. Namun demikian, pendekatan ini masih memiliki keterbatasan dalam menjelaskan dimensi ekonomi secara lebih mendalam, terutama terkait kalkulasi keuntungan material dan interdependensi ekonomi global. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk menggabungkan pendekatan ini dengan perspektif lain seperti geoekonomi, neorealisme ofensif, atau bahkan pendekatan liberal institusionalisme, agar mampu memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai motif dan implikasi keanggotaan Indonesia dalam BRICS.

Selain itu, penelitian ini masih menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif yang berfokus pada analisis konseptual dan interpretatif, sehingga belum mampu mengukur secara empiris dampak ekonomi keanggotaan Indonesia dalam BRICS. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat melengkapi kekurangan ini dengan pendekatan kuantitatif atau mixed-method, misalnya melalui analisis data perdagangan bilateral, arus investasi asing langsung (FDI), serta perubahan struktur ekspor dan impor Indonesia setelah bergabung dengan BRICS. Dengan demikian, argumen mengenai soft balancing tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga didukung oleh bukti empiris yang terukur. Di sisi lain, penelitian ini juga masih terbatas pada level analisis sistem internasional, sehingga belum mengkaji secara mendalam faktor domestik yang mempengaruhi pengambilan keputusan politik luar negeri Indonesia. Ke depan, penting untuk memasukkan variabel domestik seperti kepentingan elit politik, dinamika birokrasi, serta kondisi ekonomi nasional dalam analisis, sehingga dapat memberikan pemahaman yang lebih holistik mengenai proses pengambilan kebijakan tersebut.

Dari sisi praktis, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keanggotaan Indonesia dalam BRICS perlu dimanfaatkan secara strategis, pragmatis, dan selektif. Pemerintah Indonesia tidak seharusnya memosisikan BRICS sebagai aliansi ideologis yang berlawanan dengan Barat, melainkan sebagai instrumen untuk memperluas ruang manuver dalam sistem internasional yang semakin multipolar. Dalam hal ini, prinsip politik luar negeri bebas aktif tetap harus menjadi landasan utama, sehingga Indonesia mampu menjaga keseimbangan hubungan dengan berbagai kekuatan global, termasuk Amerika Serikat dan negara-negara Barat lainnya, tanpa kehilangan otonomi strategisnya. Pendekatan multi-alignment menjadi penting untuk memastikan bahwa Indonesia tidak

terjebak dalam rivalitas kekuatan besar, melainkan mampu memanfaatkan kompetisi tersebut untuk kepentingan nasional.

Lebih lanjut, pemerintah perlu memperkuat kesiapan domestik dalam menghadapi implikasi keanggotaan BRICS, khususnya dalam bidang ekonomi dan keuangan. Upaya seperti penggunaan mata uang lokal dalam perdagangan internasional, integrasi sistem pembayaran alternatif, serta peningkatan daya saing industri nasional harus didukung oleh reformasi kebijakan yang terkoordinasi. Tanpa kesiapan domestik yang memadai, potensi manfaat ekonomi dari BRICS justru dapat berubah menjadi kerentanan, terutama mengingat adanya kesenjangan kapasitas ekonomi antar anggota seperti China dan India yang memiliki keunggulan struktural lebih besar dibandingkan Indonesia.

Selain itu, Indonesia juga perlu mengoptimalkan perannya dalam berbagai mekanisme kerja sama BRICS, termasuk dalam pemanfaatan pembiayaan dari New Development Bank untuk mendukung proyek-proyek strategis nasional seperti pembangunan infrastruktur, transisi energi, dan hilirisasi industri. Partisipasi aktif dalam forum-forum BRICS juga harus diarahkan untuk memperkuat posisi tawar Indonesia dalam isu-isu global seperti reformasi tata kelola keuangan internasional dan peningkatan representasi negara berkembang. Dalam konteks ini, koordinasi lintas kementerian dan lembaga menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil bersifat terintegrasi dan tidak berjalan secara sektoral.

Pada akhirnya, penelitian ini menegaskan bahwa keputusan Indonesia untuk bergabung dengan BRICS merupakan bentuk strategi soft balancing yang bertujuan untuk merespons tekanan struktural dalam sistem internasional tanpa harus terlibat dalam

konfrontasi langsung. Keberhasilan strategi ini sangat bergantung pada kemampuan Indonesia dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan nasional, dinamika domestik, serta perubahan konstelasi geopolitik global. Dengan pengelolaan yang tepat, keanggotaan dalam BRICS tidak hanya akan memperkuat posisi Indonesia dalam sistem internasional, tetapi juga berkontribusi terhadap terciptanya tatanan global yang lebih inklusif dan multipolar.

